

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA Vol. 6 No. 4 Tahun 2024

Redirecting Kebijakan Input Pertanian untuk
Mengembangkan Agribisnis Beras yang Inklusif
dan Berkelanjutan

Penulis

Suprehatin, Netti Tinaprilla, Anna Fariyanti, Harmini, Rahmat Yanuar, Tursina Andita Putri, Herawati

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

Redirecting Kebijakan Input Pertanian untuk Mengembangkan Agribisnis Beras yang Inklusif dan Berkelanjutan

Isu Kunci

- 1) Terdapat perubahan kenaikan biaya usahatani padi karena perubahan jumlah penggunaan input akibat risiko produksi dan/atau perubahan harga input,
- 2) Perlu mengarahkan ulang (*redirecting*) kebijakan input pertanian berdasarkan perubahan dan tren struktur biaya usahatani padi,
- 3) *Redirecting* kebijakan input pertanian merupakan bagian dari membangun subsistem penunjang (kebijakan) agribisnis yang pada akhirnya berkontribusi penting pada pengembangan sistem agribisnis beras yang inklusif dan berkelanjutan.

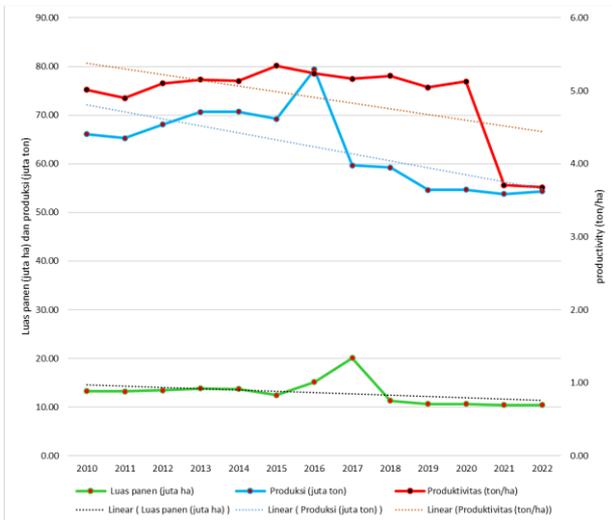
Ringkasan

Sebagai komoditas strategis nasional, beras dalam konteks sistem agribisnis masih menghadapi tantangan termasuk pada subsistem usahatani dan jasa pendukung (kebijakan). Beragam faktor eksternal seperti perubahan harga input-input pertanian dan adanya risiko produksi memengaruhi keputusan petani dalam penggunaan input dalam usahatani padi. Dinamika perubahan dan risiko tersebut berdampak pada kenaikan biaya usahatani padi dan akhirnya ke pendapatan yang diperoleh petani Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, biaya usahatani padi cenderung meningkat dengan proporsi komponen biaya usahatani padi yang dinamis baik antar waktu maupun wilayah sentra produksi. Oleh karena itu, *redirecting* kebijakan input pertanian sangat penting agar dapat memberikan dampak nyata pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani padi secara keseluruhan. Lebih lanjut *redirecting* kebijakan tersebut diperlukan untuk pengembangan agribisnis beras yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Beras, komoditas strategis, biaya usahatani, kebijakan input pertanian

Pendahuluan

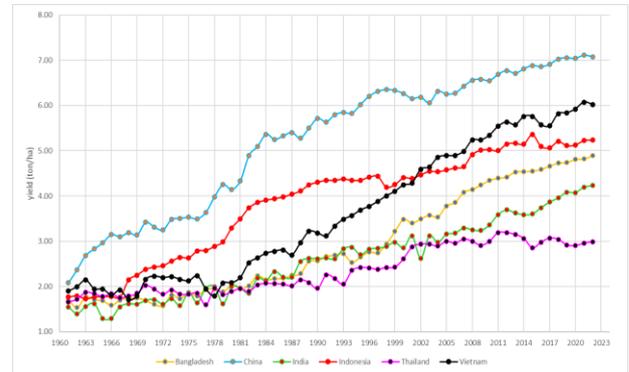
Beras merupakan komoditas strategis dalam perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia. Selain menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat, beras juga menjadi sumber mata pencaharian utama bagi petani padi. Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2023, terdapat 11,6 juta rumah tangga yang terlibat dalam usahatani padi, dan angka ini menurun sebesar 18,1% dibandingkan tahun 2013 (BPS, 2023). Penurunan ini mengindikasikan tantangan yang semakin kompleks dalam mempertahankan keberlanjutan usahatani padi, terutama di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang. Tantangan lain yaitu kinerja produktivitas yang cenderung *levelling off* pada tingkat 5 ton/ha selama satu dekade (2010-2020) yang diakibatkan menurunnya produksi dan luas lahan (Gambar 1) (BPS, 2024; Kementan, 2024).



Gambar 1. Tren Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Padi Indonesia Periode 2010-2022
Sumber: BPS (2024); Kementan (2024) (diolah)

Jika dibandingkan dengan sesama negara penghasil beras utama di dunia, produktivitas padi Indonesia tidak dapat melampaui China, bahkan jika dibandingkan dengan Vietnam yang pada awalnya jauh di bawah Indonesia, namun sejak tahun 2002 hingga 2023 produktivitas padi Vietnam melampaui Indonesia dengan tren yang semakin melesat di atas 6 ton/ha (Gambar 2). Hal ini menunjukkan kinerja

usahatani padi di Vietnam yang terus meningkat dan tentunya didukung oleh ketersediaan sarana produksi, terobosan teknologi, dan fasilitas kebijakan pemerintah.



Gambar 2. Produktivitas Padi di Beberapa Negara Utama Produsen Beras Periode 1960-2023
Sumber: FAOSTAT (2024) (diolah)

Peran sarana produksi dan teknologi pada saat ini sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas di saat usahatani padi menghadapi permasalahan risiko produksi yang semakin beragam. Dari Sensus Pertanian 2013 dapat diketahui bahwa kendala perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produktivitas padi hingga 25% (BPS, 2014). Tantangan ini menuntut agar kebijakan perberasan di level petani semakin berfokus kepada optimalisasi input produksi dan teknologi. Terlebih kondisi saat ini dimana harga-harga input produksi semakin tidak terjangkau oleh petani sehingga semakin melemahkan motivasi untuk keberlanjutan usahatani padi. Dukungan optimalisasi input produksi dan teknologi baik melalui kebijakan subsidi maupun harga dapat meringankan petani dalam hal biaya usahatani.

Upaya peningkatan produktivitas telah banyak dilakukan dari masa ke masa melalui berbagai kebijakan perberasan baik pada tingkat petani, lembaga pemasaran, juga pada tingkat konsumen. Khusus pada tingkat petani, kebijakan input produksi dan teknologi telah menyita perhatian pemerintah dengan berbagai skema kebijakan. Namun terhadap kebijakan input produksi tersebut kiranya masih diperlukan *redirecting* agar lebih efektif dan efisien sehingga

menghasilkan *outcome* kebijakan sesuai dengan target yaitu ketahanan pangan yang salah satunya melalui swasembada beras.

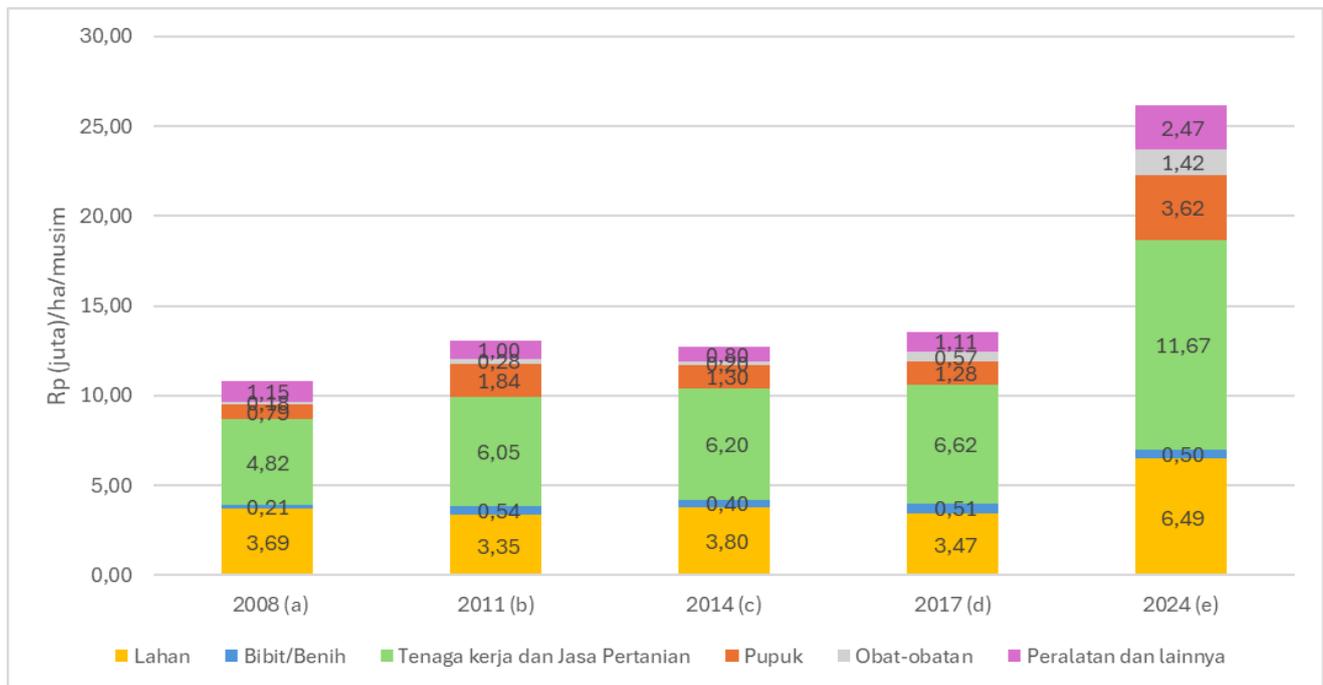
Dengan demikian menarik untuk dikaji usahatani padi terkait dengan struktur biaya yang dikeluarkan. Melalui *policy brief* ini, berlandaskan analisis data penggunaan input produksi, harga, dan struktur biaya usahatani padi, disampaikan rekomendasi strategis khususnya pada kebijakan mengenai input produksi padi untuk mendukung pengembangan agribisnis beras yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang berbasis hasil (*outcome-based*) dan adaptif terhadap dinamika eksternal maupun internal, diharapkan agribisnis beras di Indonesia dapat menjadi lebih berdaya saing dan memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan pangan nasional.

Struktur Biaya Usahatani Padi

Biaya usahatani padi menjadi salah satu isu krusial yang memengaruhi keberlanjutan agribisnis beras. Biaya usahatani padi terus mengalami peningkatan signifikan yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam

aktivitas pertanian. Petani mengeluarkan biaya usahatani padi dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan perubahan jumlah, mutu, maupun harga input produksi yang digunakan. Dari data BPS (2017 dan 2019) dinyatakan bahwa biaya usahatani padi telah meningkat dari Rp12,70 juta/ha/musim pada tahun 2014 menjadi Rp13,56 juta/ha/musim pada tahun 2017 (Gambar 1, Tabel 1). Lebih lanjut, berdasarkan penelitian yang dilakukan di empat sentra produksi padi nasional, yaitu Karawang (Jawa Barat), Grobogan (Jawa Tengah), Lamongan (Jawa Timur), dan Gowa (Sulawesi Selatan), rata-rata total biaya usahatani padi pada musim tanam tahun 2024 telah mencapai Rp26,17 juta/hektar/musim (Suprehatin *et al.*, 2024) (Gambar 1, Tabel 1). Nilai tersebut melampaui dua kali lipat dibandingkan tahun 2017.

Selain hal tersebut, jika komponen total biaya usahatani dikelompokkan menjadi biaya tunai dan nontunai menunjukkan bahwa biaya tunai usahatani padi memiliki proporsi (79,03%) lebih besar dibandingkan biaya nontunai yaitu mencapai Rp20,68 juta/ha/musim (Suprehatin *et al.* 2024).



Gambar 3. Struktur Biaya Usahatani Padi Sawah Tahun 2008, 2011, 2014, 2017 dan 2024
 Sumber: (a) BPS (2008); (b) BPS (2011); (c) BPS (2014); (d) BPS (2017); (e) Suprehatin *et al.* (2024)

Di lain pihak, biaya nontunai memiliki proporsi 20,97% dari biaya total atau senilai Rp5,49 juta/ha/musim. Nilai biaya tunai mengalami pergeseran dari tahun 2014 (berdasarkan data BPS) dimana pada saat itu biaya tunai sekitar 61,42% dari biaya total. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani padi saat ini semakin mengandalkan biaya tunai dan semakin sedikit biaya nontunai seperti lahan milik sendiri dan tenaga kerja dalam keluarga (TKDK).

Kondisi ini menuntut semakin banyaknya dana tunai dalam usahatani padi dikarenakan semakin rendahnya partisipasi anggota keluarga dalam usahatani dan pelepasan lahan milik. Ketergantungan yang tinggi pada input tunai meningkatkan kerentanan petani terhadap fluktuasi harga input. Lebih lanjut, fenomena kelangkaan tenaga kerja pertanian dan lahan yang sesuai untuk usahatani padi akan berdampak semakin tingginya biaya usahatani padi khususnya biaya tunai. Pergeseran ini mencerminkan semakin menurunnya penggunaan sumber daya internal, seperti lahan milik sendiri dan TKDK, yang sebelumnya banyak diandalkan oleh petani dalam berusaha padi. Dalam arti lain, dominan penggunaan faktor produksi eksternal yang semakin dinamis dan *uncertainty* berimplikasi semakin meningkatnya risiko produksi dalam usahatani.

Komponen Utama Biaya Usahatani Padi

Jika dilihat dari komponen biaya dalam struktur biaya usahatani padi, tenaga kerja memegang peranan penting sebagai komponen terbesar terhadap biaya total. Alokasi biaya tenaga kerja pada usahatani padi utamanya ditujukan saat proses persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Berdasarkan data BPS (2017 dan 2019), komponen biaya tenaga kerja pada usahatani padi di Indonesia tahun 2014 adalah Rp6,20 juta/ha/musim atau sebesar 48,82% dari biaya total. Nilai ini meningkat menjadi Rp6,62 juta/ha/musim pada tahun 2017 dan terus meningkat menjadi Rp11,67 juta/ha/musim berdasarkan penelitian Suprehatin *et al.* (2024).

Dengan nilai tersebut, proporsi biaya tenaga kerja mencapai 44,61% terhadap total biaya usahatani padi. Walaupun proporsi biaya tenaga kerja lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun biaya tenaga kerja tetap memegang peranan terbesar. Menurunnya proporsi biaya tenaga kerja dapat diakibatkan oleh faktor urbanisasi, transisi generasi muda ke sektor non pertanian, berkurangnya tenaga kerja di pedesaan, dan preferensi petani terhadap mekanisasi. Musilah *et al.* (2021) juga menyebutkan bahwa penurunan persentase biaya disebabkan oleh meningkatnya penggunaan peralatan pertanian.

Komponen biaya kedua terbesar adalah lahan dengan proporsi 25,61% pada tahun 2017 atau senilai Rp3,47 juta/ha/musim (BPS, 2019) dan selaras dengan penelitian Suprehatin *et al.* (2024) bahwa lahan memegang peranan penting kedua setelah tenaga kerja dengan proporsi 24,79% atau senilai Rp6,49 juta/ha/musim. Tingginya biaya lahan diduga terkait dengan konversi lahan pertanian ke nonpertanian yang meningkatkan nilai sewa lahan. Selain itu, kebijakan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan belum sepenuhnya efektif mengendalikan konversi ini, sehingga menyebabkan keterbatasan akses lahan produktif bagi petani.

Setelah itu komponen terbesar ketiga adalah biaya pupuk. Berdasarkan data BPS (2019) proporsi biaya pupuk yaitu 10,24% tahun 2014 dan 9,43% tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2024 telah meningkat menjadi 13,83% atau senilai Rp3,62 juta/ha/musim (Suprehatin *et al.*, 2024). Peningkatan biaya pupuk disebabkan oleh fluktuasi harga di pasar global serta ketergantungan petani pada pupuk kimia. Meskipun program subsidi pupuk masih diterapkan, banyak petani yang mengeluhkan keterbatasan distribusi dan ketidaktepatan sasaran, sehingga harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih tinggi.

Biaya untuk input lain seperti benih dan pestisida masing-masing mencapai 3,79% dan 4,2% pada tahun 2017 (BPS, 2019) sedangkan pada tahun

2024 menjadi 1,92% dan 5,44% (Suprehatin *et.al.*, 2024) dengan variasi antar wilayah tergantung pada preferensi petani dan tingkat risiko serangan hama. Meskipun proporsi biaya input ini relatif kecil, namun peran input ini sangatlah penting terutama benih unggul.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalam struktur biaya usahatani padi, terdapat tiga biaya utama yaitu tenaga kerja, lahan, dan pupuk yang sangat berperan dalam usahatani padi di Indonesia. Kenaikan total biaya usahatani padi, terutama pada tiga komponen utama tersebut dapat memperbesar tekanan ekonomi bagi petani. Ini bermakna bahwa setiap kenaikan harga ketiga input produksi tersebut akan berdampak besar pada biaya total usahatani padi. Hal ini terjadi pada saat ini dimana lonjakan harga input seperti pupuk, tenaga kerja, sewa lahan, pestisida, dan benih unggul yang tidak didukung dengan daya beli atau permodalan, memperparah kondisi petani dalam usahatannya. Dengan terpaksa petani mengurangi dosis, mengganti, atau tidak lagi menggunakan

input tersebut yang pada akhirnya akan mengganggu produktivitas.

Kenaikan biaya budidaya padi terutama disebabkan oleh meningkatnya harga input pertanian. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa pupuk, pestisida, dan tenaga kerja merupakan kontributor utama peningkatan biaya produksi (Mottaleb & Mohanty, 2015; Sary *et al.*, 2021; Nguyen *et al.*, 2021; Chanakya & Nandi, 2024). Petani skala kecil sangat terdampak, mengalami kerugian profitabilitas yang lebih besar dibandingkan petani skala besar karena penggunaan input yang lebih tinggi (Mottaleb & Mohanty, 2015). Di Kamboja, biaya input pada berbagai tahap pertumbuhan padi secara signifikan memengaruhi total biaya produksi, dengan pupuk, pestisida, dan tenaga kerja menjadi faktor utama (Sary *et al.*, 2021). Petani yang cenderung menghindari risiko sering menggunakan input kimia secara berlebihan, sehingga meningkatkan biaya dan menurunkan efisiensi (Nguyen *et al.*, 2021).

Tabel 1. Penerimaan, Biaya dan Keuntungan Usahatani Padi Sawah di Indonesia Tahun 2014, 2017 dan 2024

Uraian	Padi Sawah (2014 ^a)		Padi Sawah (2017 ^b)		Padi Sawah (2024 ^c)	
	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
A. Nilai Produksi	17,20		18,51		27,48	
B. Biaya Produksi	12,70	100,00	13,56	100,00	26,17	100,00
1. Lahan	3,80	29,92	3,47	25,61	6,49	24,79
2. Bibit atau benih	0,40	3,15	0,51	3,79	0,50	1,92
3. Tenaga kerja dan jasa pertanian	6,20	48,82	6,62	48,79	11,67	44,61
4. Pupuk	1,30	10,24	1,28	9,43	3,62	13,83
5. Pestisida	0,20	1,57	0,57	4,20	1,42	5,44
6. Peralatan dan lainnya	0,80	6,30	1,11	8,19	2,47	9,42
Biaya tunai	7,80	61,42	7,93	58,47	20,68	79,03
Biaya nontunai	4,90	38,58	5,63	41,53	5,49	20,97
Biaya total	12,70	100,00	13,56	100,00	26,17	100,00
C. Keuntungan atas Biaya Tunai	9,40	54,65	10,59	57,18	6,80	24,75
D. Keuntungan atas Biaya Total	4,50	26,16	4,96	26,77	1,31	4,78
E. R/C atas Biaya Tunai	2,21	-	2,34	-	1,33	-
F. R/C atas Biaya Total	1,35	-	1,37	-	1,05	-

Keterangan: TC = biaya total, R/C = rasio penerimaan dan biaya
 Sumber: a) BPS (2017), b) BPS (2019), c) Suprehatin et al (2024)

Di India, biaya budidaya telah meningkat di berbagai negara bagian penghasil padi utama, dengan kenaikan terjadi pada biaya pupuk, tenaga mesin, dan tenaga manusia, meskipun penggunaan tenaga kerja mengalami penurunan seiring waktu (Chanakya & Nandi, 2024).

Jika perubahan struktur biaya yang mengarah pada kenaikan biaya total tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, maka akan berdampak pada keuntungan. Faktanya, produktivitas padi di Indonesia cenderung pada kondisi *levelling off* pada satu dekade terakhir. Hal ini mengancam keberlanjutan usahatani padi di mana besarnya keuntungan yang semakin kecil membuat petani kehilangan insentif untuk melanjutkan aktivitas usahatani padi. Dalam arti lain, apabila kondisi ini terus berlanjut maka dapat memengaruhi keputusan petani untuk melanjutkan usahatani. Pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan agribisnis beras dan ketahanan pangan di Indonesia.

Penerimaan dan Keuntungan Usahatani Padi

Secara umum, petani sebagai produsen utama padi di Indonesia, masih mendapatkan nilai (*value*) yang lebih kecil dibandingkan aktor-aktor lain dalam rantai nilai agribisnis beras. Penerimaan atau nilai produksi yang dihasilkan usahatani padi tahun 2017 yaitu Rp18,51 juta/ha/musim (Tabel 1; BPS, 2019) telah meningkat menjadi Rp27,48 juta/ha/musim pada tahun 2024 (Suprehatin *et al.*, 2024). Namun kenaikan nilai produksi ini tidak menaikkan keuntungan. Keuntungan petani dari usahatani padi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp4,96 juta/ha/musim dan pada tahun 2024 sebesar Rp1,31 juta/ha/musim (Suprehatin *et al.*, 2024). Walaupun nilai produksi meningkat, namun nilai keuntungan ini semakin kecil dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan perubahan struktur biaya yang mengarah pada peningkatan biaya total yang semakin besar yang tidak dapat *discover* oleh penerimaan. Pada akhirnya dengan keuntungan

yang kecil dan menurun serta penurunan kesejahteraan, akan berdampak pada demotivasi petani untuk mengelola usahatannya sehingga mengganggu keberlanjutan swasembada pangan.

Dilihat dari efisiensi biaya usahatani, dari data BPS (2019) menunjukkan bahwa usahatani padi di Indonesia dapat dikatakan efisien dengan nilai R/C sebesar 1,37 (Tabel 1). Namun nilai ini menurun menjadi 1,05 pada tahun 2024 (Suprehatin *et al.*, 2024) yang mengindikasikan usahatani padi di Indonesia semakin tidak efisien. Lebih jauh kondisi ini akan berdampak pada alih profesi petani padi. Untuk itulah maka *redirecting* kebijakan input pertanian perlu dirancang berlandaskan dinamika perubahan yang terjadi.

Rekomendasi Kebijakan Input Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai struktur biaya usahatani padi tersebut, secara umum kebijakan input pertanian di Indonesia penting untuk memperhatikan peningkatan total biaya usahatani padi dan proporsi biaya tunai. Selain itu juga perlu mempertimbangkan persentase terbesar dari komponen biaya usahatani padi yakni tenaga kerja, lahan dan pupuk.

Rekomendasi kebijakan input pertanian yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

1. Kebijakan terkait tenaga kerja. Proporsi biaya tenaga kerja yang besar menunjukkan bahwa usahatani padi di Indonesia membutuhkan perawatan manual pada beberapa tahap budidaya. Walaupun merupakan komponen terbesar, namun dari tahun ke tahun trennya menurun yang mengindikasikan pergeseran dari pola *labor intensive* ke arah *capital intensive* (alat dan mesin pertanian modern). Berdasarkan hal tersebut, kebijakan dapat diarahkan seperti mekanisasi pertanian namun yang tetap tepat guna sesuai dengan kebutuhan petani dan karakteristik wilayah baik secara sosio demografi maupun agroekosistem.

2. Kebijakan terkait lahan pertanian. Biaya sewa atau penggunaan lahan termasuk berkontribusi besar yaitu mencapai hampir seperempat dari total biaya usahatani padi. Oleh karena itu, kebijakan dapat diarahkan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian yang produktif melalui efektivitas dan penguatan kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2P). Tentunya, kebijakan baik yang sudah ada atau inovasi kebijakan berikutnya akan bermuara pada lima tujuan UU PL2P tersebut yaitu (a) melindungi dan mengembangkan lahan pertanian secara konsisten, (b) menjamin ketersediaan pangan pokok, (c) mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian pangan, (d) menekan laju konversi lahan sawah, dan (e) mempertahankan fungsi ekologi lahan. Oleh karena semakin sulitnya perolehan lahan garapan bagi petani kecil maka perlu kebijakan agraria yang mengizinkan petani kecil menggarap lahan milik pemerintah melalui skema tertentu (misalkan bagi hasil) pada lahan yang sekiranya tidak mengganggu *master plan* perwilayahan.
3. Kebijakan terkait pupuk. Sebagai faktor produksi penting, tren kontribusi pupuk terhadap total biaya usahatani padi cenderung meningkat. Secara umum, kebijakan pupuk tetap diarahkan untuk ketersediaan pupuk dalam enam tepat (6T), yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Penggunaan pupuk kimia pada usahatani padi telah dituangkan dalam SOP usahatani padi namun banyak petani yang tidak mematuhi arahan penggunaan pupuk berimbang yang disesuaikan dengan kondisi lahan, sehingga penggunaan pupuk kimia menjadi tidak optimal (sebagian petani kekurangan dan sebagian petani berlebihan dalam

penggunaan). Dalam rangka menuju *sustainable agriculture* yang membatasi penggunaan pupuk kimia serta semakin mahalnya harga pupuk kimia, maka kebijakan pupuk perlu diarahkan kepada pupuk alternatif seperti pupuk organik yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal petani. Sedangkan penggunaan pupuk kimia berimbang perlu didukung melalui kebijakan subsidi dan distribusi secara langsung untuk penyaluran yang lebih efektif.

Pada dasarnya kebijakan input produksi lainnya juga tetap harus diperhatikan meskipun proporsi input tersebut pada total biaya usahatani tidak dominan. Arah kebijakan untuk input-input lainnya tersebut dapat berprinsip pada *no one size fits all*. Ini berarti kebijakan ini bersifat sesuai dengan kebutuhan petani dan wilayah yang umumnya sangat heterogen di Indonesia. Sebagai contoh, benih sebagai input yang tidak terlalu dominan dalam struktur biaya (3,15% tahun 2014, 3,76% tahun 2017, dan 1,92% tahun 2024) adalah input produksi yang penting dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman padi. Telah banyak kebijakan benih padi yang diimplementasikan melalui pelepasan varietas tanaman (PVT) dan telah melepas lebih dari 400 benih unggul baik hibrida maupun inbrida. Namun dalam pelaksanaannya petani tidak memanfaatkan inovasi benih tersebut dan terjebak pada rutinitas penggunaan benih tertentu. Dengan demikian, diperlukan kebijakan perbenihan yang mengarah kepada efektivitas distribusi dan availabilitas benih unggul tepat waktu dengan harga yang terjangkau. Kebijakan benih program atau bersubsidi dapat diarahkan untuk daerah yang defisit benih berkualitas atau yang terdampak bencana alam.

Contoh lain adalah mengenai obat-obatan hayati seperti biopestisida, bioherbisida dan biofungisida. Merespon adanya degradasi lingkungan akibat penggunaan pestisida kimia berlebih perlu dikembangkan terus kebijakan yang meningkatkan adopsi pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan *good agricultural practices* (GAP) yang lebih *up to date*.

Agar seluruh kebijakan yang ditawarkan berjalan efektif selaras dengan *redirecting* kebijakan input pertanian maka diperlukan kebijakan penyuluhan atau pendampingan petani dalam pengelolaan input produksinya. Walaupun sebagian besar petani padi di Indonesia telah berpengalaman puluhan tahun, namun kehadiran penyuluh atau pendamping yang kompeten sangat dibutuhkan sebagai sarana diskusi, inovasi, dan transmisi kebijakan. Penyuluhan dan pendampingan sangat krusial bagi petani kecil sehingga dalam sistem agribisnis, ini menjadi lembaga yang mendukung setiap subsistem secara keseluruhan (*supporting institution*).

Kesimpulan

Sebagai sebuah sistem, agribisnis beras (padi) tidak akan berhasil apabila ada subsistem yang bermasalah. Subsistem kebijakan agribisnis sangat penting termasuk untuk mendukung subsistem usahatani padi oleh petani kecil. Kebijakan input pertanian saat ini masih difokuskan pada subsidi input, artinya pemerintah memberikan sarana produksi dalam bentuk fisik langsung maupun penurunan harga. Kebijakan saat ini juga cenderung bersifat *one size fits all* yang memandang satu kebijakan dapat menyelesaikan semua masalah di Indonesia, sementara kondisi setiap wilayah adalah beragam dan memiliki permasalahan yang berbeda dalam satu isu (misalnya pupuk), termasuk yang dihadapi tiap petani. Oleh karena itu, kebijakan input pertanian kedepannya perlu mempertimbangkan kondisi terkini dan tren perkembangan struktur biaya usahatani dan sesuai dengan kebutuhan petani dan wilayah (*targeted and customized*).

Berdasarkan hal tersebut, *redirecting* kebijakan input pertanian dapat memprioritaskan pada komponen terbesar dalam struktur biaya usahatani padi yaitu tenaga kerja, lahan dan pupuk. Meskipun demikian kebijakan input lain seperti benih dan biopestisida juga tetap diperlukan

dengan menyesuaikan kebutuhan petani dengan profil usahatani mereka yang beragam.

Redirecting kebijakan input pertanian perlu memilah dan mendetailkan kebijakan sesuai dengan dinamika dan kondisi usahatani padi pada setiap isu kebijakan input produksi dengan karakteristik sosio demografis dan agroekosistem berbagai wilayah. Sebagai tindak lanjut *redirecting* kebijakan input pertanian tersebut perlu dikaji mengenai penetapan prioritas input produksi beserta SOP dan penggunaannya dalam suatu pedoman umum dan petunjuk teknis yang memuat analisis usahatani padi secara detail dengan data terkini. Hal ini agar kebijakan input pertanian dapat lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan petani dan dapat mewujudkan pengembangan agribisnis padi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendukung ketersediaan pangan nasional.

Daftar Pustaka

- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2008). Struktur ongkos usaha tani padi 2008. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/50260-ID-struktur-ongkos-usaha-tani-padi-2008.pdf>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2011). Struktur ongkos usaha tani tanaman pangan 2011. Jakarta: BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/publication/2011/1/2/13/517d7e028560339a94cda1a9/struktur-ongkos-usaha-tani-tanaman-pangan-2011.html>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2014). Nilai produksi dan biaya produksi per musim tanam per hektar budidaya tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTg1NSMx/nilai-produksi-dan-biaya-produksi-per-musim-tanam-per-hektar-budidaya-tanaman-padi-sawah--padi-ladang--jagung--dan-kedelai--2014.html>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2017). Nilai produksi dan biaya produksi per musim tanam per hektar budidaya tanaman padi sawah, padi

- ladang, jagung, dan kedelai. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA1NSMx/nilai-produksi-dan-biaya-produksi-per-musim-tanam-per-hektar-budidaya-tanaman-padi-sawah--padi-ladang--jagung--dan-kedelai--2017.html>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2019). Nilai produksi dan biaya produksi per musim tanam per hektar budidaya tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA1NSMx/nilai-produksi-dan-biaya-produksi-per-musim-tanam-per-hektar-budidaya-tanaman-padi-sawah--padi-ladang--jagung--dan-kedelai--2017.html>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2023). Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1. Jakarta: BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/15/def0edfb13a6b16411ec8c80/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023-tahap-i.html>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2024). Tabel dinamis statistik ekonomi pertanian, produksi, luas lahan, dan produktivitas. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/query-builder>
- Chanakya M, Nandi AK. (2024). Growth dynamics of cost of cultivation in major paddy growing states of India. *International Journal of Research in Agronomy*, 7(3S), 210-215. <https://doi.org/10.33545/2618060X.2024.v7.i3Sc.433>
- FAOSTAT. (2024). Crops and livestock products database. Retrieved from <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>
- [Kementan] Kementerian Pertanian. (2024). Portal Statistik Komoditas. Retrieved from <https://11ap.pertanian.go.id/portalstatistik/bdsp/komoditas>
- [Kementan] Kementerian Pertanian. (2024). Portal Statistik Indikator. Retrieved from <https://11ap.pertanian.go.id/portalstatistik/bdsp/indikator>
- Mottaleb KA, Mohanty S. (2014). Farm size and profitability of rice farming under rising input costs. *Journal of Land Use Science*, 10(3), 243–255. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2014.919618>
- Nguyen TT, Do MH, Rahut D. (2021). Shock, risk attitude and rice farming: Evidence from panel data for Thailand. *Environmental Challenges*, 5, 100430. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100430>
- Sary S, Phearin B, Sereyvatha S, Saren S, Sophyn S, Sikalubya M. (2021). An assessment of input cost at different stages of rice growth and its effect on production cost on Cobb-Douglas function in Cambodia. *American Journal of Agriculture and Forestry*, 9(6), 424-430. <https://doi.org/10.11648/j.ajaf.20210906.21>
- Suprehatin, Tinaprilla N, Fariyanti A, Harmini, Yanuar R, Wijayanti P, Putri TA, Herawati, Hakim RI, Lestari PM, Alifah S. (2024). Laporan akhir kajian mikro asuransi usahatani padi (AUTP). Bogor: Departemen Agribisnis FEM IPB dan JASINDO.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Suprehatin, Dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis tertarik pada penelitian mengenai food systems, agrifood value chain, agrifood policy, food security, sustainability, and political economy.

(Corresponding Author)

Email: suprehatin@apps.ipb.ac.id



Netti Tinaprilla, Dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, yang menekuni bidang agribisnis dan ekonomi pertanian khususnya komoditas beras/padi dan hortikultura baik dalam kegiatan akademik pengajaran, riset, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Topik yang banyak digeluti antara lain farm management, risiko agribisnis, dan pemasaran agribisnis.



Anna Fariyanti, Dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, menekuni bidang risiko agribisnis, ilmu usahatani, ekonomi usaha pertanian, dan ekonomi rumah tangga.



Harmini, Dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Menekuni bidang ilmu ekonomi, ekonomi pertanian, dan statistika.



Rahmat Yanuar, Dosen di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB University. Menekuni bidang penelitian terkait ekonomi pertanian, ekonomi kelembagaan dan risiko agribisnis.



Tursina Andita Putri, Dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Menekuni bidang penelitian terkait agribisnis khususnya farm management dan ekonomi usaha pertanian.



Herawati, Dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Menekuni bidang ilmu agribisnis dan ekonomi pertanian.

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680